



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	25 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

## Eks Pemilik Lahan Masih Ditagih Pajak

**LEBAK, (KB).-**  
Munculnya tagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) kepada warga eks pemilik lahan Tol Serang-Panimbang (Serpan) menuai polemik.

Sebab, SPPT-PBB itu tak seharusnya terbit, karena status hak lahan sudah bukan milik warga. Hal itu salah satunya terjadi di Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak. Kepala desa (Kades) setempat, Subadri mengaku kebingungan menjelaskan soal terbitnya tagihan SPPT-PBB kepada eks

pemilik lahan pembebaan Tol Serpan di wilayahnya. Karena, status lahan yang seharusnya sudah dialihkan haknya dari warga kepada negara belum juga terealisasi.

"Warga pemilik lahan yang terlintas ROW proyek Tol Serang-Panimbang kan sudah menerima kompensasi ganti rugi lahan. Namun, SPPT-PBB nya kok masih atas nama pemilik sebelumnya," kata Subadri kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Menurut dia, karena status lahannya sudah peralihan hak dari warga kepada negara. Maka, warga eks pemilik lahan sudah tidak terbebani untuk pembayaran SPPT lagi. SPPT seharusnya dibebankan kepada pihak pengelola Tol.

"Kalau seperti ini, siapa yang harus

bertanggung jawab untuk membayar pajak ke negara. Sekarang SPPT yang diterbitkan Bapenda ada di desa. Dan saya bingung harus gimana," ujarnya.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak M Didi Ali Subandi mengatakan, terkait masih terbitnya SPPT-PBB tersebut, kemungkinan masih mengacu kepada data lama. Jika seperti itu, maka jangan dibayarkan jika bidang tanahnya sudah dialihkan ke negara.

"Langsung saja menginformasikan kepada Bapenda bahwa lahan tersebut kena proyek jalan tol Serang-Panimbang," ucap Didi.

### Ajukan balik nama

Sementara, Kepala Bapenda Lebak Hari Setiono, akan mengecek data ter-

lebih dahulu, apakah pihak pengelola jalan Tol sudah mengajukan ke Bapenda untuk meminta balik nama SPPT atau belum.

"Yang saya takutkan, pihak pengelola Tol belum melakukan proses balik nama wajib pajak. Sehingga SPPT atas nama warga masih tumbul di kita," ucapnya.

Disinggung soal tol apakah akan dikenakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya menyebutkan bahwa tol tetap dikenakan wajib pajak. Sebab, jasa tol masuk ke bisnis.

"Nanti akan kita tetapkan PBB nya, setelah mereka mengajukan proses pergantian nama wajib pajak dan sudah berjalan fungsi penggunaan tol nya," tuturnya. (H-38)\*\*\*